

**ANALISIS PENYAJIAN PENDAPATAN DAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN PP NO. 71 TAHUN 2010**

**(STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN GRESIK)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**SILVIA NUR RAHMI**

**NIM: G72219073**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN

Saya, Silvia Nur Rahmi, G72219073, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Maret 2023



Silvia Nur Rahmi  
G72219073

# HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 30 Maret 2023

## ANALISIS PENYAJIAN PENDAPATAN DAN PIUTANG PAJAK DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP NO. 71 TAHUN 2010

(STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN GRESIK)

Diajukan oleh:

**SILVIA NUR RAHMI**

**NIM: G72219073**

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**



Hastanti Agustin Rahayu, S.E., M. Acc., Ak., CA., BKP.

NIP. 198308082018012001



Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag.

NIP. 197708272005012002

## LEMBAR PENGESAHAN

# ANALISIS PENYAJIAN PENDAPATAN DAN PIUTANG PAJAK DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP NO. 71 TAHUN 2010 (STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN GRESIK)

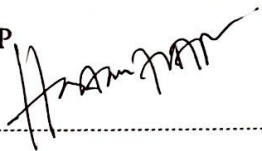
Oleh  
Silvia Nur Rahmi  
NIM: G72219073

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 April 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Susunan Dewan Penguji :

Tanda Tangan:

1. Hastanti Agustin Rahayu, S.E., M.Acc., Ak., CA., BKP  
NIP. 198308082018012001  
(Penguji 1)



2. Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E., M.S.A., Ak., CA  
NIP. 198905282019032014  
(Penguji 2)



3. Mochammad Ilyas Junjunan., S.E., M.A.  
NIP. 199303302019031009  
(Penguji 3)



4. Luqita Romaisyah, S.A., M.A.  
NIP. 199210262020122018  
(Penguji 4)



Surabaya, 14 April 2023



Surajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Silvia Nur Rahmi  
NIM : G72219073  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi  
E-mail address : silvianurrahmi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Analisis Penyajian Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 (Studi Kasus pada BPPKAD Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2024

Penulis



( Silvia Nur Rahmi )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Penerapan akuntansi basis akrual diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, pendapatan pajak daerah diakui menggunakan basis akrual, yaitu mengakui pendapatan-LO ketika timbul hak atas pendapatan dan ketika pendapatan direalisasi. Kemudian mengakui pendapatan-LRA pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian dan konsistensi penyajian pendapatan dan piutang pajak daerah Kabupaten Gresik berdasarkan SAP PP No. 71 tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif dengan tahun amatan 2017-2021. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa proses penyajian akuntansi pendapatan dan piutang pajak daerah pada BPPKAD Kabupaten Gresik dalam praktiknya telah dilakukan sesuai dan konsisten dengan SAP PP No. 71 tahun 2010. Namun untuk tahun amatan 2017, berdasarkan hasil penelitian melalui telaah dokumen, tidak ditemukan rincian penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang pada masing-masing jenis pajak daerah dalam CaLK sehingga tidak dapat diketahui rincian jumlah penyisihan piutang pajak daerah yang sebenarnya.

Rekomendasi yang dapat diberikan penelitian ini adalah berkaitan dengan urgensi atas restrukturisasi pajak daerah dalam rangka penerapan UU HKPD. Maka, BPPKAD Kabupaten Gresik perlu untuk memperhatikan jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasan-penjelasanannya khususnya pada jenis pajak yang dilakukan restrukturisasi untuk keperluan pengungkapan pendapatan pajak daerah pada laporan keuangan daerah. Selain itu, hal yang dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi adalah pendataan ulang atas pajak daerah dan upaya penyelesaian piutang agar piutang yang disajikan nantinya dapat diidentifikasi dan informasi dalam laporan keuangan daerah dapat diterima secara wajar.

Kata kunci: Penyajian Akuntansi, Pendapatan Pajak, Piutang Pajak, PP No. 71 tahun 2010

## ABSTRACT

The application of accrual basis accounting is expected to be useful in improving the quality of government financial reports so that the information presented becomes more accountable and transparent. According to PP No. 71 of 2010, regional tax revenues are recognized on an accrual basis, which recognizes LO-revenue when a right to revenue arises and when the revenue is realized. Then recognize LRA-income when received in the Regional General Cash Account (RKUD). The goal to be achieved in this study is to see the suitability and consistency of the presentation of regional tax revenues and receivables in Gresik Regency based on SAP PP No. 71 of 2010. This research is a case study research using a descriptive qualitative method with the observation year 2017-2021. The techniques used in data collection included documentation, observation and interviews, which were then analyzed using the Miles and Huberman models.

This study resulted in the finding that the process of presenting local tax revenue and receivables accounting at BPPKAD Gresik Regency in practice has been carried out in accordance with and consistent with SAP PP No. 71 of 2010. However, for the observation year 2017, based on research results through document review, no details of allowance for doubtful accounts were found based on the quality of receivables for each type of regional tax in CaLK so that details of the actual amount of allowance for regional tax receivables cannot be known.

The recommendations that this research can provide are related to the urgency of local tax restructuring in the context of implementing the HKPD Law. Thus, the BPPKAD of Gresik Regency needs to pay attention to the types of local taxes and their explanations, especially on the types of taxes that are being restructured for the purpose of disclosing regional tax revenues in the regional financial reports. In addition, things that can be done in the context of restructuring are re-collection of regional taxes and efforts to settle receivables so that the receivables presented can later be identified and the information in the regional financial reports can be accepted fairly.

Keywords: Presentation of Accounting, Tax Revenue, Tax Receivables, PP No. 71 of 2010

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah .....	12
1.3 Rumusan Masalah .....	13
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.5.1 Manfaat Teoretis.....	14
1.5.2 Manfaat Praktis.....	14
BAB 2.....	15
LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Kajian Teoretis.....	15
2.1.1 <i>Agency Theory</i> (Teori Keagenan).....	15
2.1.2 Pajak Daerah.....	17
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010.....	20
2.1.4 Pendapatan Daerah .....	20
2.1.5 Piutang Daerah .....	22
2.2 Penelitian Terdahulu .....	25





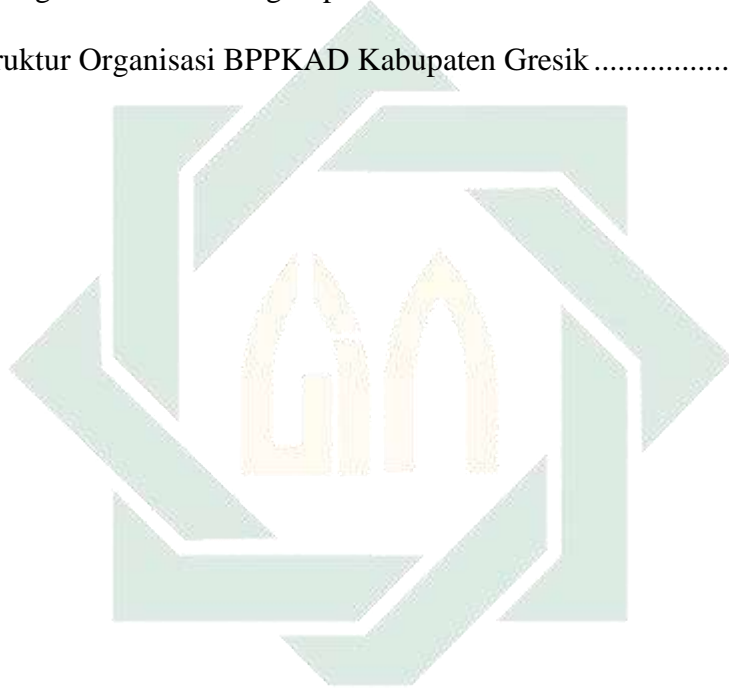
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021 .....	5
Tabel 1.2 Fluktuasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2017-2021 .....	5
Tabel 1.3 Fluktuasi Target Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 .....	6
Tabel 1.4 Fluktuasi Target Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 .....	6
Tabel 1.5 Fluktuasi Target Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran .....	47
Tabel 4.2 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah dalam Laporan Operasional ....	47
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 .....	48
Tabel 4.4 Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 .....	49
Tabel 4.5 Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 .....	50
Tabel 4.6 Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 .....	52
Tabel 4.7 Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 .....	54
Tabel 4.8 Rincian Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 .....	55
Tabel 4.9 Piutang Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021 .....	57
Tabel 4.10 Rincian Piutang Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 .....	58
Tabel 4.11 Rincian Piutang Pajak Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	32
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Gresik .....	44



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	104
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Penelitian .....	105
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara .....	114
Lampiran 4 Layanan <i>Online</i> Pajak Daerah Kabupaten Gresik .....	115
Lampiran 5 Rincian Piutang Pajak Kabupaten Gresik .....	116
Lampiran 6 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA .....	125



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiqoh, N. (2019). Pro and Control On Application of PP No 71 of 2010 in Presentation of Accrual Based on Financial Statements (Case Study: Gresik District). *South East Asia Journal of Contemporary Business ...*, 18(5), 250–259.
- Afiqoh, N. W. (2020). Application of Accrual-Based Government Accounting Standards and Obtaining Fair Opinions Without Exceptions. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(2), 244–259. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.12925>
- Badriyah, S. N. L. (2011). Implementasi PP No. 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrua: Tujuan, Manfaat, Hambatan, dan Strategi. *EBBANK*, 2(2), 225–230.
- Budiarso, N., & Napitupulu, L. S. (2015). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 463–472.
- Dwitayanti, & Putri. (2016). Application of the Permendagri No. 64 2013 On Listing of Tax Accounting Hotels (Study on Regional Revenue Board of Blitar Regency). *JOSAR (Journal of Students Academic Research)*, 1(2), 77–87.
- Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013* (Jatiningrum (ed.)). Salemba Empat.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Ruslan & M. M. Effendi (eds.)). CV Jejak.
- Ganing, P. (2020). Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 29–45.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *PERPAJAKAN Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (B. Hernalyk (ed.); 3rd ed.). Salemba Empat.

- Hendrawaty, E. (2017). *Excess Cash dalam Teori Keagenan*. Anugrah Utama Raharja.
- Hijriah, H. (2020). Tinjauan Perlakuan Dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 39–51.
- Indriani, M., Mulyany, R., Nadirsyah, N., & Munandar, W. (2018). Readiness of Local Government in the Implementation of Accrual Accounting: The Case of Local Government in Aceh, Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 87–100.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis* (1st ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Korowocyeng, B. K., Morasa, J., & Afandi, D. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 179–189.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399.
- Pangalila, B. R., Pangemanan, S. S., Warongan, J. D. L., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 234–246.
- Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1–26.
- Rampengan, M. A., Morasa, J., & Pusung, R. (2021). Analisis Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 326–335.

- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah* (1st ed.). Rajawali Pres.
- Saragih, A. H. (2017). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan. *Sikap*, 2(1), 20–34.
- Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59–69.
- Sofi, I. (2022). *Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id.
- Sriyana, J. (1999). Hubungan keuangan pusat-daerah, reformasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 102–113.
- Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Penerbit Alfabeta.
- Yuliansyah, & Adelina, Y. E. (2019). The Implementation of Accrual Basis Accounting by Indonesia's Local Governments. *International Review of Public Administration*, 24(2), 67–80.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A